

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Masalah ekonomi tentunya menarik berbagai lapisan masyarakat, berbagai penelitian telah dicoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tak jarang juga terjadi kegagalan dalam percobaan itu. Berawal dari kegagalan tersebut mulailah muncul berbagai macam ekonomi alternatif, dimana salah satunya ialah ekonomi yang berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat yang disebut dengan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan lebih mudah untuk dipahami sebagai ekonomi yang lebih mengarah kepada sistem ekonomi kemasyarakatan. Salah satu tokoh terkenal akan pemikiran ekonomi yang membahas tentang ekonomi kerakyatan ini ialah Muhammad Hatta. Pemikiran beliau di dalam bidang ekonomi sering disebut sebagai pemikir tentang ekonomi kerakyatan. Pada saat Hatta menulis "*Pengaruh Kolonial Kapitala di Indonesia*" dan "*Ekonomi Ra'jat*", ia secara terang-terangan mengatakan bahwa keadaan *Malaise* memengaruhi pembicaraannya tentang ekonomi rakyat. Hatta tampaknya sangat memperhatikan dampak Depresi terhadap ekonomi rakyat dalam artikelnya, "*Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja*." Jika kita melihat kembali dua tulisannya, serta bukunya yang berjudul "*Krisis Ekonomi dan Kapitalisme*" (1934) dan karya-karya yang diterbitkan setelahnya, kita akan melihat bahwa kecemasan Hatta terhadap Depresi Ekonomi mencerminkan kedua sifatnya sebagai seorang patriot dan sebagai

seorang ekonom. Artinya, ketika menulis artikel-artikel itu, terlibat bukan hanya seorang Hatta sebagai manusia yang cemas terhadap nasib rakyat kecil bangsanya, tetapi juga seorang Hatta sebagai sarjana ekonomi. Sebagai ekonom, Hatta berusaha mempelajari masalah keilmuan di balik persoalan ekonomi nyata yang mendera bangsanya, termasuk mencari cara memecahkan masalah dari sudut pandang keilmuan.

Dalam sebuah uraiannya yang dimuat Majalah *Daulat Ra'jat* no.7/Th I, yang terbit pada 20 November 1931, dengan tegas Hatta menyatakan bahwa setelah kekuatan benteng kapitalisme kolonial diketahui, langkah selanjutnya adalah merumuskan politik perekonomian yang bisa memajukan perekonomian rakyat.

“Ketahoeilah lebih dahoeloe poesat kekoetaan lawan kita dan pahami benar-benar segala fasal jang menjebabkan kelemahan kita. Ketahoei poela struktur (soesoenan) pergaoelan hidoep kita dengan sedalam-dalamnja, soepaja dapat kita menjoesoen pertahanan perekonomian (economische weerbaarmaking) menoeroet tjara jang sesoeai dengan struktur tadi. Dengan perasaan sadja (sentiment) koloniaal kapitalisme itoe tidak dapat dilawan. Perasaan itoe baik dan bagoes sebagai motor pergerakan, karena ta' ada poela pergerakan jang boleh madjoe dengan tiada sentiment. Akan tetapi perdjalananan pergerakan haroes dipimpin oleh otak jang sehat.” (Hatta M. , Pengaruh Kolonial Kapital di Indonesia, 1931)

Sebagaimana disebutkan di atas, politik perekonomian juga harus berfungsi sebagai pertahanan ekonomi. Perekonomian harus dilindungi dengan tenaga rakyat karena bahaya yang besar dari kapitalisme dan imperialisme barat. Ini adalah apa yang Hatta sebut sebagai "kerakyatan dalam ekonomi". Politik perekonomian tidak akan berhasil melawan dan mempertahankan tanpa dukungan kesadaran dan usaha rakyat. Akibatnya, politik ekonomi Indonesia Merdeka harus mengutamakan rakyat sebagai raja. Menurut Hatta dalam Majalah *Daulat Ra'jat* No.38/Th. II, yang diterbitkan pada

30 September 1932, sebuah negeri hanya dapat maju jika penduduknya terlibat dalam aktivitas perekonomian serta mampu membedakan antara hal-hal yang bermanfaat dan tidak bagi kepentingan umum.

“Demikianlah toedjoeannja dasar Kedaoelatan Ra’jat jang kita pahami. Ra’jat mendjadi radja atas dirinja sendiri, ...

Negeri jang ra’jatnja hanja tahoe menerima perintah dan tidak pernah toeroet memperhatikan atau mengatoer pemerintahan negeri, negeri jangbegitoe tidak dapat moelia selama-lamanja dan achirnja boleh djadi ta’loek kepada kekoekaan bangsa asing.” (Hatta M. , Krisis Doenia dan Nasib Ra’jat Indonesia, 1932)

Sangat jelas bahwa Hatta memikirkan ekonomi kerakyatan sebagai strategi ekonomi untuk Indonesia Merdeka. Kapitalisme kolonial yang ada dan masih berjalan, serta krisis kapitalisme di seluruh dunia yang terjadi saat ini, mengakibatkan ekonomi rakyat semakin tersudutkan. Oleh karena itu, Indonesia harus menetapkan politik perekonomian berdasarkan prinsip kerakyatan, yaitu memperhatikan, melibatkan, dan bertumpu pada tenaga rakyat ketika merdeka nanti.

Ketika Indonesia merdeka, Hatta memasukkan gagasan ekonomi kerakyatan ke dalam konstitusi Indonesia. Salah satu komponen utama gagasan itu adalah Pasal 33 UUD 1945, yang mana berfungsi sebagai dasar untuk menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan, yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat atas sistem perekonomian nasionalnya. Sistem ekonomi ini menggunakan konsep kebersamaan dan gotong royong yang dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan ekonomi kerakyatan. Hatta menjadi arsitek dari Pasal ini, yang menjadikannya konstitusi ekonomi selain konstitusi politik.

Menurut Fadli Zon (2016 : 83) istilah "ekonomi kerakyatan" secara semiotik menggambarkan rakyat sebagai salah satu aktor dalam kegiatan perekonomian, yang harus dibela dan diberdayakan karena posisi mereka yang rentan terpinggirkan. Negara dan pasar tetap memiliki peran, tetapi rakyat tetap menjadi pusat. Ekonomi Kerakyatan, yang disebut sebagai "demokrasi ekonomi" dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, adalah model politik-ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari operasi ekonomi Negara.

Secara ringkas, karya Hatta menunjukkan perspektifnya terhadap kedudukan manusia dan modal. Menurutnya, akumulasi modal ada untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, ia dengan yakin menunjuk koperasi sebagai tempat atau media untuk melaksanakan gagasan ekonomi rakyatnya. Koperasi memang telah berkembang di Eropa sejak terutama paruh kedua abad ke-19. Pandangan Hatta tentang kedudukan modal dan manusia dalam kegiatan perekonomian terbukti tepat pada koperasi.

Istilah "koperasi" berasal dari kombinasi kata "ko," yang berarti "bersama-sama," dan kata "operasi," yang berarti "bekerja". Pengertian dari koperasi berarti menandakan individu yang bekerja sama secara setara. Di dalam koperasi, semua peserta berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama daripada bersaing satu sama lain. Menurut Subandi (2013) yang mengutip buku "Histoire Desdactrines Cooperative," Dr. G. Mladenta menjelaskan bahwa koperasi terdiri dari produsen yang berkumpul secara sukarela untuk mengejar tujuan bersama melalui pertukaran layanan secara

kolaboratif dan berbagi risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh anggota. Subandi (2013) juga menjelaskan dalam buku “Passing Monopoly as an Aim of Cooperative” yang di tulis oleh H.E. Erdman, koperasi dapat digambarkan sebagai usaha bisnis bersama yang diakui sebagai badan hukum, di mana anggota memiliki dan memanfaatkan layanannya. Setiap keuntungan yang dihasilkan di luar pengeluaran organisasi didistribusikan kembali kepada anggota berdasarkan interaksi mereka dengan koperasi. Seperti yang dinyatakan oleh Hendrojogi (2012) yang mengutip dari Fay (1908), koperasi mewakili kolaborasi individu dengan tujuan bersama, terutama mereka yang membutuhkan dan secara konsisten bekerja dengan pola pikir manfaat kolektif daripada keuntungan individu. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota memenuhi tanggung jawab mereka dalam organisasi dan menerima kompensasi yang adil sebanding dengan kontribusi mereka.

Pada peta pemikiran yang lebih luas, gagasan Ekonomi Kerakyatan Hatta dapat dilihat sebagai akibat dari konflik yang terjadi di antara berbagai ideologi besar di Eropa pada saat itu, serta sebagai respons langsung terhadap krisis kapitalisme. Hatta mencoba membangun semacam "jalan tengah", istilah yang ia pinjam dari Herry-Priyono.

Herry-Priyono berpendapat bahwa konsep ekonomi kerakyatan Hatta bukan tentang memilih antara kapitalisme dan sosialisme, tetapi lebih kearah memulihkan proses dan sumber daya ekonomi kepada rakyat. Gagasan Hatta semakin relevan di tengah globalisasi neoliberal. Namun, menerima atau menolak globalisasi bukanlah

cara terbaik untuk menghadapinya. Masalah ekonomi kerakyatan di masa depan dapat dikatakan bukan hanya tentang memilih antara koperasi atau korporasi, tetapi lebih tentang menciptakan proses dan mekanisme untuk mencegah sumber daya masyarakat menjadi semakin terlepas dari mayoritas tangan rakyat.

“Dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong ialah koperasi. Seluruh perekonomian rakyat harus berdasar koperasi. Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan orang seorang. Seterusnya koperasi mengandung dasar pendidikan kepada anggotanya ke jalan berbakti dan bertanggung-jawab dalam hal mengurus keperluan bersama. Di atas bangunan-bangunan koperasi itu diadakan Pimpinan Pemerintah, untuk mengkoordinir segala usaha produktif bagi keselamatan masyarakat.” (Hatta M. , Bung Hatta Berpidato, Bung Hatta Menulis, 1979)

Dalam organisasi koperasi sendiri memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap reformasi sosial melalui integrasi para pelaksana ekonomi dalam masyarakat dari perspektif ganda. Pada awalnya, mereka memiliki kapasitas untuk secara kolektif menggabungkan para pelaksana ekonomi individu untuk memasarkan barang mereka langsung ke konsumen, sehingga membangun posisi negosiasi yang kuat. Selain itu, koperasi yang memiliki daya tawar yang tangguh dapat beroperasi sebagai badan perantara dalam pengadaan komoditas penting untuk para pelaksana ekonomi individu langsung dari penyuplai di sektor ekonomi kontemporer. Semua oknum penindasan serta benalu ekonomi secara efektif diberantas melalui fasilitas organisasi koperasi.

Menurut Hatta, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat Indonesia yang dipengaruhi oleh pertumbuhan koperasi di Denmark dan hubungannya dengan

demokrasi politik di negara itu. Hatta tampaknya sejalan dengan Ravnholt mengenai gagasan bahwa fondasi demokrasi ekonomi, yang didirikan melalui upaya kolaboratif masyarakat koperasi akan berfungsi sebagai asal mula untuk pembentukan dan pemeliharaan demokrasi politik dalam masyarakat. Menurut Sritua Arief (2002), dalam pidato radio yang disampaikan untuk memperingati dimulainya hari koperasi yang ketiga pada tanggal 11 Juli tahun 1953, Hatta merujuk pada penjelasan Ravnholt dalam karya ilmiahnya yang berjudul *“The Danish Cooperative Movement”*:

“Dalam perkumpulan koperasi, dasar-dasar ekonomi telah terlebih dahulu dijalankan sebelum rakyat Denmark seluruhnya mengenal demokrasi politik”.

Sebagai pendukung prinsip-prinsip demokrasi, Hatta sepertinya telah menunjukkan minat yang menonjol dalam korelasi antara perluasan koperasi dan kemajuan prinsip-prinsip dan praktik demokrasi serta sistem politik di Denmark karena koperasi menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di antara penduduk. Hatta berpendapat bahwa fondasi demokrasi bergantung pada penanaman rasa tanggung jawab bersama di antara warga negara. Demokrasi mungkin ada, tetapi itu hanyalah nama. Di dalam kehidupan sebenarnya, demokrasi adalah anarki yang menunjukkan keinginan yang tidak konsisten untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hatta berpendapat bahwa ada hubungan simbiosis antara koperasi dan demokrasi. Menurut Sritua Arief (2002) Koperasi meningkatkan rasa tanggung jawab dalam sistem demokrasi, sementara demokrasi menjadi tertanam dalam ranah koperasi.

Hatta mengatakan bahwa kolektivisme ada dalam koperasi. Di dalam badan koperasi, kedudukan anggota sejajar dan sama rata, sehingga menghilangkan perbedaan antara pengusaha dan karyawan; seluruh anggota dianggap sebagai karyawan yang bekerja sama secara kolektif untuk memenuhi tujuan bersama. Hatta menganalogikan koperasi sebagai sebuah keluarga, dengan anggota yang memiliki tanggung jawab yang sama, berkolaborasi satu sama lain untuk meningkatkan koperasi, seperti keamanan keluarga yang sangat tergantung pada tingkat intuisi dan nilai-nilai etika yang dimiliki oleh karyawan seluruhnya. Koperasi hanya dapat berkembang jika cita-cita ditanamkan dalam anggotanya; ini didasarkan pada kepercayaan bahwa rakyat Indonesia harus segera dibangkitkan melalui upaya kolaboratif dan berakar kuat pada etos budaya bangsa yaitu gotong royong. Keyakinan ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama timbal balik, solidaritas, dan aksi kolektif dalam menumbuhkan keterikatan sosial dan kemajuan dalam masyarakat Indonesia.

Di ranah koperasi, prinsip dasar kolektivisme adalah yang mengarah pada pengecualian remunerasi bagi para pengelolanya. Atasan dan pekerja yang terlibat dalam partisipasi aktif dan berdedikasi untuk kerja penuh waktu yang berhak atas imbalan remunerasi dalam kerangka ini. Sementara itu, pengelola yang melayani dalam struktur koperasi terbatas hanya menerima tunjangan untuk transportasi atau remunerasi waktu hadir pada pertemuan resmi. Namun demikian, pertemuan semacam itu dijadwalkan mungkin terjadi setiap minggu atau dua minggu, dengan potensi penundaan lebih lanjut dalam kasus di mana masalah yang belum terselesaikan

memerlukan musyawarah dan resolusi tambahan. Menurut Hatta (1987), atas dasar rasa kolektivisme yang mendalam ini, ia mengemukakan argumen bahwa koperasi, sebagai organisasi sosial-ekonomi yang mewujudkan prinsip-prinsip kepemilikan bersama dan pengambilan keputusan kolektif yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang optimal dan teladan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Hatta berpendapat bahwa inisiasi pengembangan koperasi biasanya tidak berawal dengan individu seperti profesor, atau intelektual lain yang memiliki fondasi kekayaan dan kesuksesan yang mapan baik untuk mereka sendiri maupun keluarga mereka. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan koperasi berawal dari masyarakat yang ekonominya lebih rendah, khususnya petani, pekerja yang tidak mampu dan pengrajin yang tidak mampu. Mereka terpicat dan tertarik dengan visi koperasi yang digambarkan oleh individu-individu yang pandai, yang akan mengarahkan pada peningkatan keadaan dan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat. Namun, mereka menyadari bahwa kemajuan koperasi sebagai hasil dari orang-orang kaya dan dermawan tidak akan terjadi dengan cepat. Mereka bertekad untuk memulainya sendiri dan mengumpulkan uang secara bertahap. Dengan uang ini, koperasi dapat membeli sejumlah besar barang dagangan sekaligus. Di ranah perusahaan ritel alternatif, distribusi keuntungan biasanya mengarah pada pemilik atau pengawas, tetapi di koperasi ini, anggota dan semua orang yang berbelanja di sana mendapatkan keuntungan dari potongan harga yang diberikan. Di dalam bukunya, Hatta (1987)

mengungkapkan bahwa dalam struktur koperasi tersebut, keuntungan finansial yang direalisasikan pada akhir tahun dialokasikan di antara anggota yang berpartisipasi dan individu yang melakukan pembelian di koperasi, sejumlah dengan besarnya jumlah belanjaan dari setiap transaksi individu.

Hatta lebih lanjut menguraikan struktur koperasi dengan menggambarkan komposisinya menjadi dua cabang yang berbeda, yaitu cabang kebersamaan dan cabang perorangan. Anggota sebuah koperasi harus saling memiliki rasa solidaritas kepada satu sama lain, karena kerjasama berfungsi sebagai fondasi koperasi. Selain itu, Koperasi memerlukan rasa individualitas, mengacu pada rasa nilai diri di antara anggotanya. Kesadaran akan nilai diri sangat penting bagi anggota untuk secara aktif mengejar, mencapai, dan menjaga tujuan bersama. Kesadaran diri ini menumbuhkan percaya diri dan memungkinkan tindakan untuk berhasil dan membantu kebutuhan bersama. Harga diri yang tinggi menumbuhkan keyakinan pada kekuatan diri untuk berbuat dan ada Keyakinan yang sangat penting untuk memberantas perasaan rendah diri yang telah mendarah daging dalam diri rakyat Indonesia selama berabad-abad pemerintahan kolonial. Hubungan kebersamaan dan perorangan hanya dapat berkembang dalam kemitraan yang selaras dalam koperasi. Koperasi menanamkan rasa tanggung jawab sosial pada manusia dengan menghidupkan dan memupuk individualitas dan solidaritas.

Menurutnya, penerapan ekonomi kerakyatan melalui koperasi menawarkan potensi ekonomi yang makmur. Koperasi mewakili model ekonomi demokratis yang

berfokus pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Subandi (2008) juga berpendapat jika kemakmuran rakyat sendiri sebagai faktor utama dalam suatu negara, yang secara signifikan berdampak pada arah ekonomi dan struktur pemerintahan.

Sebagaimana terjadi pada berbagai kelompok masyarakat lainnya, kesenjangan natural¹ merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakan. Di Indonesia, faktor-faktor ini memang turut berperan dalam mendorong terjadinya kesenjangan sosial. Kebiasaan hidup boros, tidak disiplin, dan malas terus melekat dalam budaya kelompok tertentu di Indonesia. Sulit untuk membantah bahwa elemen struktural juga berkontribusi pada memperparah kondisi kesenjangan itu. Sebagaimana diketahui, salah satu warisan kolonial terhadap perekonomian Indonesia adalah terjadinya dualisme ekonomi (Boeke, 1983). Menurut Sritua Arief (1979) selama masa ketidakstabilan politik, pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno menghadapi prospek terbatas untuk mengatasi dualisme ekonomi yang mana ketika dimulainya Orde Baru pada tahun 1969, kerangka fundamental perekonomian Indonesia terus mencerminkan keberadaan struktur dualistik. Namun, corak dualisme itu cenderung diabaikan oleh Orde Baru. Strategi pembangunan yang digunakan saat pembangunan dimulai pada tahun 1969 lebih fokus pada pencapaian pertumbuhan.

Strategi ini menimbulkan dualisme ekonomi di Indonesia dan bias urban dalam pembangunan. Kesenjangan antara pelaku ekonomi cenderung meningkat, terlepas dari

¹ Kesenjangan natural adalah jarak yang muncul dari faktor alam, yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

keberhasilan peningkatan pendapatan perkapita dari \$70 pada tahun 1969 menjadi \$1000 pada tahun 1996. Tindakan yang harus dilakukan juga harus berdasarkan faktor-faktor struktural untuk mengatasi kesenjangan ekonomi Indonesia yang lebih besar yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural. Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, misalnya, harus digantikan dengan yang berorientasi pertumbuhan sosial.

Hatta (1971) mengatakan bahwa koperasi Indonesia mewujudkan sifat komunal masyarakat Indonesia, yang didasarkan pada praktik budaya tradisional seperti gotong royong dan musyawarah. Prinsip-prinsip ini telah diangkat untuk memenuhi persyaratan era modern. Pemikiran ini didasarkan pada gagasan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki kapasitas yang paling besar untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Pada koperasi, tidak ada majikan atau pekerja, semua bekerja sama berdasarkan asas kekeluargaan yang sesuai dengan nilai dan budaya negara. Gagasan ini menyatakan bahwa, dalam konstitusi Indonesia, demokrasi ekonomi berarti menghilangkan praktik ekonomi kapitalis dan individualistis. Ini menunjukkan bahwa karyawan berpartisipasi baik sebagai pemilik perusahaan maupun sebagai anggota koperasi. Selain itu, koperasi adalah sarana mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat ekonomi golongan bawah khususnya di wilayah pedesaan (Kahin, 1980).

Prinsip - prinsip utama pembangunan berfokus pada lingkungan dan populasi masyarakat yang akan dibangun. Perkembangan yang diatur oleh administrasi Orde Baru menghasilkan kesenjangan yang signifikan antara yang berhasil dan yang tidak

dalam ranah pembangunan. Secara teknis menunjukkan kelompok makmur dan kelompok miskin atau kelompok kuat dan kelompok rentan. Penting untuk pembangunan selanjutnya adalah pendekatan ekonomi kerakyatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ekonomi.

Menurut Itang (2016 : 37) yang mengutip pernyataan dari John M.Echols (1994 : 147) pengertian koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*cooperation*” (*co*=bersama, *operation*=bekerja). Jadi koperasi yaitu sama – sama bekerja menurut rencana yang sudah ditentukan kearah tujuan yang sudah ditetapkan. Koperasi dapat juga diartikan sebagai organisasi yang terdiri dari orang – orang individu-individu yang telah berkumpul untuk terlibat dalam upaya ekonomi kolaboratif, yang dikenal sebagai usaha koperasi, dipandu oleh prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan identitas khas koperasi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan yang ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah melalui perusahaan kolektif yang didanai secara demokratis, dikelola, dan diawasi oleh peserta mereka. Dengan mengedepankan konsep gotong royong dalam penerapan nilai – nilai intisari Pancasila dianggap mampu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan konsep koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan (Pohan, 2018).

Konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta sangat menjunjung tinggi nilai keadilan serta kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diimplementasikan dengan cara rakyat Indonesia harus melakukan seluruh kegiatan perekonomian sendiri dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong serta tidak

ada campur tangan dari bangsa kolonial sehingga rakyat akan terbebas dari kesengsaraan belenggu penjajahan (Ayuni, 2015). Bung Hatta menawarkan konsep koperasi yang merupakan sebuah bentuk nyata yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi masyarakat Indonesia dalam menerapkan perekonomian masyarakat. Konsep unik koperasi dalam ranah keuangan selaras dengan kondisi spesifik dan norma sosial Indonesia yang akhirnya kerangka ekonomi koperasi diakui sebagai solusi yang menonjol untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia (Sugiharsono, 2009).

Penelitian yang membahas tentang konsep ekonomi koperasi sendiri sudah banyak dilakukan, penulis menemukan setidaknya empat penelitian tentang koperasi. Penulis menemukan jurnal tentang koperasi yang di tulis oleh Inggar Saputra, staf pengajar Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercubuana dan Akhmad Saoqillah, staf pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Attahiriyah tahun 2017, yang berjudul *Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila*. Di dalam tulisannya, Inggar dan Akhmad menjelaskan bahwa aspek ekonomi Pancasila memanifestasikan dirinya melalui pembentukan koperasi, yang berfungsi sebagai panduan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Lalu penulis menemukan jurnal yang di tulis oleh Jatmiko Wahyudi, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017, yang berjudul *Kontribusi Koperasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati)*. Di dalam tulisannya, Jatmiko menjelaskan bahwa koperasi, terutama KUD, menunjukkan potensi yang

signifikan dan telah berkontribusi aktif dalam proses pembangunan. Ketiga, penulis menemukan jurnal yang di tulis oleh Mohammad Musfiq Arifqi, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Ternate tahun 2020, yang berjudul *Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Mohammad Hatta)*. Di dalam tulisannya, Musfiq menjelaskan bahwa ekonomi populasi dalam mengembangkan ekonomi syariah mencakup tiga komponen fundamental, khususnya prinsip-prinsip solidaritas, pemberdayaan masyarakat, dan penekanan yang tinggi pada entitas kolektif. Keempat, penulis menemukan jurnal yang di tulis oleh Mochamad Adib Zain, Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Tahun 2015, yang berjudul *Politik Hukum Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia)*. Di dalam tulisannya, Adib membahas tentang politik hukum pengaturan koperasi, pada pokok pembahasan mengenai pengaturan koperasi pasca kemerdekaan, Adib menuliskan pendapat kedua proklamator yang memiliki perspektif yang hampir sama tentang demokrasi ekonomi. Menurutnya, Soekarno memperkenalkan ideologi demokrasi yang menerangkan bahwa pembubaran kapitalisme dan imperialisme dapat dicapai melalui kontrol ekonomi bersama daripada oleh beberapa orang terpilih saja. Sebaliknya, Hatta terlibat dalam pertempuran bernuansa halus dan taktis melawan kapitalisme melalui penerapan struktur koperasi, yang sangat kontras dengan prinsip-prinsip kapitalisme.

Dari keempat penelitian di atas masih tidak ada penjelasan mengenai ekonomi koperasi pada masa Orde Baru. Konsep pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta menarik perhatian penulis. Dikenal sebagai ekonom Indonesia yang berfokus pada kemajuan nasional secara keseluruhan, terutama dalam bidang ekonomi, Mohammad Hatta telah diberi gelar "Bapak Koperasi Indonesia" dan juga merupakan pelopor gerakan koperasi Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan ekonomi koperasi di Indonesia pada masa Kepemimpinan Soeharto. Penulis juga mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar gagasan yang sudah disampaikan, pembatasan masalah dalam penelitian ini berakar pada dasar-dasar penelitian sejarah, khususnya yang berkaitan dengan dimensi temporal (waktu) dan dimensi spasial (ruang). Batasan temporal dalam penelitian adalah dari tahun 1967 – 1998. Tahun 1967 diambil karena pada tahun ini mulai di berlakukannya Undang – Undang nomor 12/1967 tentang pokok – pokok koperasi dan juga berubahnya pola kebijaksanaan ekonomi. Sedangkan pada tahun 1998 karena ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun itu, koperasi sedikit banyaknya berhasil membantu membangun kembali perekonomian negara. Batasan spasial yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru terdapat fokus yang kuat pada pengembangan koperasi di Jawa.

Jawa juga memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sektor pertanian yang berkembang pesat. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa penerapan ekonomi koperasi masa Orde Baru penting dilakukan oleh pemerintah?
2. Bagaimana penerapan ekonomi koperasi Mohammad Hatta pada masa Orde Baru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya pemerintah menerapkan ekonomi koperasi pada masa Orde Baru
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ekonomi koperasi Mohammad Hatta pada masa Orde Baru

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Kegunaan penelitian secara teoritis ialah untuk dijadikan referensi dan bahan masukan untuk perkuliahan di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta maupun penulis lain yang ingin melakukan penelitian tentang ekonomi koperasi Mohammad Hatta pada masa Orde Baru.
2. Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai acuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai koperasi, dampak kebijakan pemerintah

terkait koperasi serta sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari koperasi sendiri.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Menurut Suhartono (2010) metode adalah suatu cara, prosedur atau teknik untuk mencapai sesuatu objek. Hal ini juga sama dengan pernyataan dari Suryana (2010) yang mengartikan metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah, upaya penelitian ini diperkenalkan dengan model deskriptif-naratif yang mengacu pada kerangka naratif di mana informasi terkait diungkapkan secara halus mengenai peristiwa tertentu yang terjadi. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara dan aturan ilmu sejarah. Penelitian ini dilakukan melalui pemanfaatan metodologi penelitian sejarah, yang melibatkan pemeriksaan cermat terhadap peristiwa masa lalu, dokumen, dan sumber untuk mendapatkan kesimpulan yang mendalam. Penelitian ini diartikulasikan melalui penerapan model deskriptif-naratif, kerangka naratif yang berfungsi untuk mengungkap detail dan nuansa implisit yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, sehingga meningkatkan kedalaman dan kekayaan informasi yang disajikan. Di dalam penelitian sejarah, penting untuk memberikan perhatian yang cermat dalam menangani materi dan sumber yang

diperoleh benar – benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi penelitian sejarah berfungsi untuk memperkenalkan penelitian dan komposisi sejarah, yang mencakup pendekatan sistematis untuk pemilihan topik, pengadaan sumber primer dan sekunder, evaluasi kritis data, interpretasi temuan, dan penyajian dalam bentuk melalui wacana tertulis.

Menurut (Gottschalk, 2008), bahwa penelitian sejarah meliputi empat tahapan yaitu tahap heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan. Peneliti menjelaskan tahapan penelitian sebagai berikut :

a. Heuristik/Pengumpulan Sumber

Tahap pertama yakni *heuristik*, yaitu mengumpulkan sumber. Sumber berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang terbuat, tertulis, terekam dan terdata secara langsung saat kejadian dan sumber primer yang penulis gunakan ialah arsip dan koran masa lalu. Sedangkan sumber sekunder ialah sumber yang berasal dari pihak lain di luar sumber primer atau pelaku sejarah dan sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan jurnal yang secara umum dan khusus berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini ditemukan di beberapa tempat, seperti Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

b. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap selanjutnya adalah kritik, tahap verifikasi terbagi menjadi dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik extern dan kredibilitas, atau kebiasaan, dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 2013). Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber – sumber yang didapatkan. Sedangkan kritik intern membuktikan kelayakan atau kredibilitas sumber. Pada tahap ini, penulis terlibat dalam proses pemilihan, pengorganisasian, dan evaluasi berbagai bentuk bahan tertulis seperti buku, surat kabar, dan majalah untuk dijadikan sumber penelitian. Sumber-sumber ini diperiksa dalam hal kualitas kertas, komposisi tinta, gaya penulisan, penggunaan bahasa, struktur kalimat, frasa yang digunakan, kata-kata yang dipilih, dan huruf yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh sumber-sumber terkait yang terkait dengan subjek penelitian, sementara juga memastikan bahwa kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan diakui dalam metode Sejarah. Penulis mencari artikel, majalah, dan surat kabar kontemporer yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti. Selama dalam tahap kritik, penulis membandingkan literatur yang ditemukan dalam buku-buku tentang gerakan koperasi dengan sumber-sumber surat kabar yang membahas koperasi. Analisis komparatif ini dilakukan untuk menghasilkan sumber yang dapat dipercaya yang menegakkan kredibilitas mereka.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Penelitian sejarah berpusat pada metode sejarah dengan empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dan kritik digunakan untuk memilih data atau sumber sejarah untuk mendapatkan fakta atau bukti sejarah yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, interpretasi berarti menafsirkan atau mendefinisikan fakta-fakta atau bukti sejarah, karena fakta-fakta atau bukti sejarah sebagai saksi realitas masa lalu hanyalah saksi bisu yang tidak dapat ditafsirkan dengan sendirinya. Fakta-fakta dan bukti sejarah masih harus menyadari kekuatan informasi eksternal agar peneliti atau sejarawan dapat menemukan makna dan pentingnya. Secara metodologis interpretasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian sejarah dan penulisan sejarah (Daliman, 2015). Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bidang subjektivitas, tahapan ini terbagi menjadi dua yaitu analisis yang berarti menjabarkan dan Sintesis yang artinya menggabungkan. Pada tahap ini, berbagai sumber yang telah diidentifikasi, seperti buku, arsip, jurnal dan lain-lainya. Selanjutnya, peneliti melanjutkan untuk menguraikan sumber-sumber ini dan menyusunnya kembali dengan serangkaian kata-kata yang dibuat dengan cermat oleh penulis.

d. Historiografi (Penulisan)

Tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah adalah historiografi. Pada tahap ini biasanya melakukan kegiatan penulisan hasil dari elaborasi fakta dan mencoba merekonstruksi masa lalu untuk mencari solusi atas kesulitan yang muncul setelah

sumber yang ditemukan pada tahap heuristik, kritik dan interpretasi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif naratif, yaitu tulisan yang disusun secara kronologis peristiwa dengan memperhatikan hubungan antar peristiwa.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi sejarah yang berpusat pada perspektif sejarah naratif. Metodologi yang dilaksanakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kearsipan dan studi perpustakaan. Data penelitian yang penulis gunakan berasal dari catatan tertulis yang penulis peroleh dari perpustakaan negara, lembaga arsip, buku dan juga jurnal yang digunakan dalam penelitian.

2. Bahan Sumber

Sumber Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah sumber primer dan sumber sekunder, pengumpulan sumber yang berhasil penulis temukan yaitu surat kabar Daulat Ra'jat terbitan 28 November 1931 No. 7, 20 November 1933 No. 79, Pikiran Ra'jat terbitan 13 Januari 1958, 3 Mei 1958, Video Pidato Soeharto pada 2 April 1994, 7 Mei 1994, 29 Mei 1994, 12 Juli 1995, 11 Juli 1997 dan sumber berupa buku serta disertasi juga didapatkan diantaranya : Koperasi; Teori dan Praktik, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Mohammad Hatta; Memoir, Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta dan Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam, Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1959) Dan lain sebagainya.

